

## SEJARAH KERESIDENAN PALEMBANG

Oleh:

**Kemas A. R. Panji**

*Dosen Luar Biasa pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam  
Fakultas Adab dan Budaya Islam IAIN Raden Fatah dan FKIP Pendidikan Sejarah  
Universitas PGRI Palembang.*

**Sri Suriana**

*Dosen Sejarah pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan  
Budaya Islam UIN Raden Fatah Palembang.*

### **Abstract:**

*Since the abolition of the Sultanate of Palembang Darussalam in 1825 by the Dutch colonial government, the town changed its status becoming Resident region, led by a Resident. Pointing Dutch government or lift a man named J.L. van Sevenhoven as First Resident. Palembang residency divided into several Afdeeling except in the capital of Palembang. Afdeeling each headed by a Resident Assistant. Each Afdeeling consists of Onder Afdeeling headed by a controller. Each Onder Afdeeling there are clans, each headed by a Chief Marga (Pasirah). While the capital city of Palembang is divided into two, namely the District across Ilir District and District Seberang Ulu held by a Demat. Residency of Palembang, Jambi, Lampung and Bangka Belitung included in the Province of South Sumatra, is the fourth residency in the early days were in the area Administrative Sumatra (1 province) with capital of Medan, Sumatra then divided into 3 new Province namely: North Sumatra Province (It consists of Residency of Aceh, East Sumatra (Medan), and Tapanuli), Central Sumatra Province (It consist of Resident of West Sumatra (Bukit Tinggi), Riau, Jambi), South Sumatra Province (consisting of: Residency of Palembang, Bengkulu, Lampung and Bangka-Belitung). Post-Expansion into 3 provinces of Sumatra, Palembang Resident position changes its status to the Governor of South Sumatra.*

**Keywords:** *Residency of Palembang, Resident, South Sumatra Province, Governor.*

### **Pendahuluan**

Sebagai pendahuluan dalam penulisan ini sebaiknya diawali dengan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan judul tulisan agar pembaca bisa mudah memahami tentang Keresidenan Palembang. Pertanyaan pertama dimulai dengan kalimat apakah yang dimaksud residen dan keresidenan? Residen adalah jabatan

struktural (kepala pemerintahan wilayah) pada masa penjajahan Belanda di Indonesia yang ada diseluruh wilayah Indonesia, Residen berkedudukan di bawah Gubernur (lihat pada “Struktural Pemerintahan Hindia Belanda”). Keresidenan Palembang adalah wilayah kekuasaan administratif seorang Residen yang meliputi beberapa wilayah bagiannya yang terdiri dari Afdeeling dan Onder Afdeeling hingga Kampung/Marga, atau bisa juga didefinisikan bahwa Keresidenan (*regentschappen*) adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia hingga tahun 1950-an.

Pertanyaan kedua, apakah keresidenan hanya ada di wilayah Palembang saja atau Sumatera Selatan saja? Keresidenan adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia hingga tahun 1950-an. Sebuah keresidenan (*regentschappen*) terdiri atas beberapa *afdeeling* (kabupaten). Tidak semua provinsi di Indonesia pernah ada keresidenan. Hanya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Lombok, dan Sulawesi saja. Biasanya ini daerah-daerah yang penduduknya banyak, berikut ini nama-nama Keresidenan yang pernah ada di Indonesia;

1. Pulau Sumatera terdiri dari: Keresidenan Aceh (*Atjeh en Onderhoorigheden*), Keresidenan Bangka-Belitung (*Bangka en Biliton*), Keresidenan Bengkulu (*Benkoelen*), Keresidenan Jambi, Keresidenan Lampung (*Lampoengsche Districten*), Keresidenan Palembang, Keresidenan Riau (*Riouw en Onderhoorigheden*), Keresidenan Sumatera Barat (*Westkust van Sumatra*), Keresidenan Sumatera Timur (*Oostkust van Sumatra*), Keresidenan Tapanuli.
2. Pulau Jawa terdiri dari: Keresidenan Bagelen, dihapus pada tahun 1901 dan digabungkan dengan Keresidenan Kedu, Keresidenan Banten (*Bantam*), Keresidenan Banyumas, Keresidenan Besuki (*Basoeki*), Keresidenan Bogor (*Buitenzorg*), Keresidenan Cirebon (*Tjirebon*), Keresidenan Jakarta (*Batavia*), Keresidenan Karawang (*Kerawang*), Keresidenan Kediri, Keresidenan Kedu, Keresidenan Madiun (*Madioen*), Keresidenan Madura (*Madoera*), Keresidenan Malang (*Pasoeroewan*), Keresidenan Pati (*Djapara*), Keresidenan Priangan (*Preanger*), Keresidenan Pekalongan, Keresidenan Rembang, Keresidenan Semarang (*Samarang*), Keresidenan Surabaya, Keresidenan Surakarta

- (*Soerakarta*), statusnya dinaikkan menjadi provinsi, Keresidenan Yogyakarta (*Jogjakarta*), statusnya dinaikkan menjadi provinsi pada tahun 1928.
3. Pulau Kalimantan terdiri dari: Keresidenan Kalimantan Barat (*Westerafdeeling van Borneo*), Keresidenan Kalimantan Tengah, Keresidenan Kalimantan Timur (*Zuider en Oostafdeeling van Borneo*).
  4. Pulau Sulawesi terdiri dari: Keresidenan Sulawesi Selatan (*Celebes en Onderhoorigheden*), Keresidenan Sulawesi Utara (*Manado*).
  5. Sunda Kecil terdiri dari: Keresidenan Bali-Lombok (*Bali en Lombok*), Keresidenan Timor (*Timoren Onderhoorigheden*).
  6. Maluku dan Papua terdiri dari: Keresidenan Maluku (*Molukken*)

Pertanyaan ketiga, berapa lama masa keresidenan berdiri di Indonesia dan Palembang khususnya? Keresidenan Palembang diresmikan oleh pemerintah Belanda sebagai salah satu wilayah administratif Belanda, ditandai dengan menghapuskan pemerintahan lokal saat itu (Kesultanan Palembang Darussalam). Jika dihitung sejak tahun 1825-1957 (selama ±132 tahun Keresidenan Palembang memerintah) pemerintah Belanda menunjuk atau mengangkat seseorang yang bernama J.L. van Sevenhoven sebagai Residen (pertama) tahun 1825 di Keresidenan Palembang.

Pertanyaan keempat, apakah sistem pemerintahan Keresidenan Palembang ini masih ada sampai dengan saat ini? Sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1825, Jabatan Residen Palembang dijabat secara berkelanjutan atau secara periodik. Keresidenan Palembang bersama 9 Keresidenan Lainnya yang berada di wilayah/pulau Sumatera menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera (1 Provinsi), kemudian Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi 3 Provinsi yaitu sbb: Provinsi Sumatera Utara (terdiri dari Keresidenan Aceh, Sumatera Timur (Medan), dan Tapanuli), Provinsi Sumatera Tengah (Keresidenan Sumatera Barat (Bukit Tinggi) Riau, dan Jambi), Provinsi Sumatera Selatan (Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Bangka-Belitung). Pasca Pemekaran provinsi Sumatera menjadi 3 Provinsi, Selanjutnya, Jabatan Residen Palembang berganti statusnya menjadi Gubernur Sumatera Selatan.

## **Pembahasan**

Pada masa awal pemerintahan kolonial “Hindia Belanda” di Palembang, masih

mempertahankan dan memberdayakan susunan pemerintahan tradisional yang ada pada masa itu. Pasca Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan tahun 1825, Belanda mengangkat J.L.van Sevenhoven sebagai Residen Pertama di Palembang (1825) dan Belanda mengangkat juga (Menantu Sultan Mahmud Badaruddin II) Pangeran Kramo Jayo Sebagai Perdana Menteri pada tahun 1838.<sup>1</sup> Para penguasa Tradisional (Elite Lokal) yang mau diajak kerjasama atau menyatakan setia kepada Belanda diangkat menjadi aparat pemerintahan Belanda akan diberikan pangkat dan jabatan tertentu misalnya Pangeran, Ranga, Demang, Pasirah, Kapiten Cina, (pangkat militer Tituler), dll. Selain itu, untuk melengkapi alat pemerintahan Belanda di Palembang dan daerah Uluu maka dari tiap-tiap kelompok etnis diangkatlah seorang pimpinan untuk mewakili golongannya dengan memakai pangkat-pangkat militer Tituler. Hal ini bertujuan untuk mengukuhkan kekuasaan Belanda di Palembang (Panji, 2002: 20).

Tindakan Belanda yang menunjuk dan mengangkat kemudian memecat para pangeran yang silih berganti itu menggambarkan betapa sulitnya Belanda untuk memaksakan kekuasaannya di Palembang terutama di daerah Uluu. Meskipun pada waktu itu pemerintah kolonial Berada di Palembang dan menguasai Bangka Belitung, tetapi secara riil daerah Uluu yang letaknya jauh dari pusat kota, kekuasaan pemerintah kolonial belum atau kurang dirasakan. Bahkan sampai pada pertengahan tahun 1860-an Belanda masih belum dapat berkuasa sepenuhnya atas daerah pedalaman (Sevenhoven, 1971:9). Oleh sebab itu pada masa transisi ini P. de Roo De La Faille (1971: 50-53) mengatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda masih membutuhkan bantuan pengaruh dan tenaga dari golongan tertentu, karena merasa

---

<sup>1</sup>Pada tahun 1838 Belanda mengangkat Pangeran Kramo Jayo Abdul Aziz menjadi Perdana Menteri (Rijksbestuurder) yang ditempatkan di bawah kekuasaan Residen, Pengangkatan ini dikukuhkan oleh Surat Keputusan Koning Willem tertanggal 2 Januari 1838 dan diperkuat pula oleh Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia No. 11 tanggal 8 September 1840. Untuk membujuk Pangeran Kramo Jayo agar setia kepada pemerintahan Belanda diberi pula berbagai gelar tambahan "Pangeran Bupati Perdana Menteri Kramo Jayo" atau Pangeran Kramo Jayo Mangkunegara Sultan Agung Alam Khabir Sri Maharaja Mutar Alam Senopati Martapura Ratu Mas Panembahan Raja Palembang. Pada tahun 1849 Pangeran Kramo Jayo dituduh terlibat dalam usaha menentang Pemerintah Belanda (Pemberontakan) sehingga Ia dipecat dari jabatannya pada tahun 1850. Kemudian diasingkan ke ke Purbalingga (Banyumas) pada tahun 1851, sampai ia Wafat disana tahun 1862. Sejak peristiwa ini pemerintah Belanda tidak percaya dan mengangkat para bangsawan Palembang/priyai yang ada hubungan keluarga dengan Sultan-sultan Palembang Darussalam untuk dijadikan Pejabat Tinggi setingkat Perdana Menteri (Rijksbestuurder) bahkan jabatan ini dihapuskan di hanya ada Residen dan bawahannya (Djohan Hanafiah, 1998: 91).

takut dan belum banyak memiliki kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi daerah ini.

Sejak tahun 1825, kota ini berubah statusnya mejadi daerah keresidenan yang dipimpin oleh seorang Residen. Keresidenan Palembang dibagi atas beberapa *Afdeeling* kecuali Ibukota Palembang. Masing-masing *Afdeeling* dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Tiap-tiap *Afdeeling* terdiri dari *Onder Afdeeling* yang dikepalai oleh seorang Kontroler. Tiap-tiap *Onder Afdeeling* terdapat *marga-marga*. Setiap *marga* dikepalai oleh seorang Kepala *marga* (Pasirah). Sedangkan Ibukota Palembang dibagi atas dua distrik, yaitu distrik Seberang Ilir dan distrik Seberang Ulu dipimpin oleh seorang *Demang*.

Jabatan *Demang* adalah setingkat dengan Bupati di beberapa keresidenan di Pulau Jawa, yang secara terstruktur tersusun sebagai berikut. Pejabat di bawah Gubernur Jenderal adalah → Gubernur, → Residen, → Asisten Residen, → Kontroler, → Bupati, dan seterusnya. Di wilayah Keresidenan Palembang tidak mengenal jabatan bupati pada saat itu melainkan hanya mengenal pangkat *Demang* yang dijabat oleh pemuka/priyayi pribumi. Kemudian, pada masa revolusi fisik pangkat *Demang* ini diganti dengan nama Wedana. Kemudian barulah dikenal istilah bupati dan walikota setelah sistem Keresidenan Palembang dihapuskan. Karena itu, pernah tercatat bahwa di seluruh wilayah Keresidenan Palembang terdapat 15 distrik dan 40 *onder* distrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang *demang* dan asisten *demang*, serta 174 *marga* yang terbagi dalam berbagai dusun dan kampung (Panji, 2002: 19).

Terhitung sejak tahun 1825, seperti yang tertulis di atas, Pemerintah Kolonial Belanda mengubah status Kota Palembang mejadi keresidenan ditandai dengan pengangkatan seorang residen. Sebagai residen pertama diangkatlah J.L. van Sevenhoven. Selain itu, Belanda mengangkat juga menantu Sultan Mahmud Badaruddin II -Pangeran Kramo Jayo- sebagai Perdana Menteri (*Rijksbestuurder*) tahun 1838. Pada tahun 1849 Pangeran Kramo Jayo dituduh terlibat dalam usaha menentang Pemerintah Belanda (pemberontakan), sehingga ia dipecat dari jabatannya pada tahun 1850. Kemudian, ia diasingkan ke Purbalingga (Banyumas) pada tahun 1851, sampai ia wafat di sana tahun 1862. Sejak peristiwa ini pemerintah Belanda tidak percaya dan mengangkat para bangsawan/priyayi Palembang yang ada

hubungan keluarga dengan Sultan-sultan Palembang Darussalam untuk dijadikan pejabat tinggi setingkat Perdana Menteri (*Rijksbestuurder*). Bahkan, jabatan ini dihapuskan, sehingga residen hanya dibantu oleh asisten residen, kontroler, *demang*, asisten *demang*, *depati/ngabehi/pembarap*, kepala kampung, dan kepala dusun/*kerio* (Hanafiah, 1998: 91).

Setelah tidak ada lagi pejabat pribumi yang menjabat sebagai Pedana Menteri, dengan Keputusan Pemerintah tanggal 13 Juni 1864, Keresidenan Palembang dibagi menjadi sembilan *afdeeling*, yaitu sebagai berikut:

1. *Afdeeling* Ibukota Palembang;
2. *Afdeeling* Tebing Tinggi terbagi dalam beberapa *Onder Afdeeling*, yaitu: Musi, Ulu, Kikim, Ampat Lawang, dan Rejang dan Lebong.
3. *Afdeeling* Lematang Ulu dan Ilir, terbagi dalam beberapa *Onder Afdeeling*, yaitu: Lematang Ilir, dan Pasemah.
4. *Afdeeling* Komering Ulu, Ogan Ulu, dan Enim, terbagi dalam beberapa *Onder Afdeeling*, yaitu: *onder Afdeeling* Ogan Ulu dan Enim dan *Onder Afdeeling* Mekakau dan Semendo.
5. *Afdeeling* Rawas
6. *Afdeeling* Musi Ilir
7. *Afdeeling* Ogan Ilir dan Blida
8. *Afdeeling* Komering Ilir
9. *Afdeeling* Banyuasin

Pada tahun 1872 *Afdeeling* di Keresidenan Palembang dipadatkan menjadi hanya tujuh *Afdeeling*, dan kemudian pada tahun 1878 dipadatkan lagi menjadi enam *Adeeling* di mana Palembang tidak berstatus *afdeeling* melainkan menjadi Distrik Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Berdasarkan Stbl. 1906 No.466 dan 1907 No. 528 *afdeeling* di Keresidenan Palembang dipadatkan lagi menjadi menjadi empat *Afdeeling* saja (Panji, 2002: 19-20). Adapun pembagian *afdeeling* dan *onder afdeeling* di Keresidenan Palembang adalah sebagai berikut:

1. Daerah Ibukota Keresidenan Palembang terbagi dalam dua distrik yaitu: Distrik Seberang Ilir dan Distrik Seberang Ulu
2. *Afdeeling* Palembang Ilir atau *Palembangsche Benedenlanden*, ibukotanya di Sekayu, terbagi dalam beberapa *onder afdeeling*, yaitu: *onder afdeeling* Musi Ilir

(Sekayu), *onder afdeeling* Banyuasin (Banyuasin, Tanah Kubu, dan Talang Betutu), *onder afdeeling* Rawas (Surulangun), dan *onder afdeeling* Ogan Ilir (Tanjung Raja).

3. Afdeeling Palembang Ulu atau *Palembangsche Bovenlanden*, ibukotanya Lahat, terbagi dalam beberapa *onder afdeeling* yaitu: *onder afdeeling* Lematang Ulu (Lahat), *onder afdeeling* Lematang Ilir (Muara Enim), *onder afdeeling* Tanah Pasemah (Pagaralam), *onder afdeeling* Tebing Tinggi (Tebing Tinggi), *onder afdeeling* Musi Ulu (Muara Beliti).
4. Afdeeling Ogan Ulu dan Komerling dengan Ibukotanya Baturaja, terbagi dalam beberapa *onder afdeeling*, yaitu: *onder afdeeling* Komerling Ulu (Lubuk Batang), *onder afdeeling* Ogan Ulu (Martapura), *onder afdeeling* Muara Dua (Muara Dua), dan *onder afdeeling* Komerling Ilir (Kayu Agung).

Menurut Djohan Hanafiah (1998:91-95) menyatakan bahwa setelah tahun 1930<sup>2</sup> Afdeeling di Keresidenan Palembang dipadatkan lagi menjadi menjadi 3 Afdeeling saja. Adapun Pembagian Afdeeling dan Onder Afdeeling tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Afdeeling* Palembang Ilir atau *Palembangsche Benedenlanden*, (di bawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Ibukota “Kota Palembang”, membawahi beberapa *onder afdeeling* yaitu;
  - a. Palembang di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Palembang, terdiri dari 43 Kampung, Distrik Seberang Ilir terdiri dari 29 Kampung, dan Distrik Seberang Ulu terdiri dari 14 kampung.
  - b. *Onder Afdeeling* Ogan Ilir (di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Tanjung Raja), terdiri dari beberapa *Marga*, yaitu: Pemulutan, Tanjung Batu, Pegagan Ilir Suku Satu, Lembak, Sakotigo, Alai, Pegagan Ilir Suku Dua, Kertamulia, Pegagan Ulu (Sirah Pulaukilip), Gelumbang, Rantau Alai, Parit, Lubuk Keliat, Muara Kuang, Burai, Rambang Empat Suku, Tambangan Kelekar, Lubai Suku Satu, dan Meranjat.
  - c. *Onder Afdeeling* Komerling Ilir (di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Kayu Agung), terdiri dari beberapa *Marga*, yaitu: Jejawi,

---

<sup>2</sup>Keberadaan *afdeeling* dan *onder afdeeling* di Keresidenan Palembang tercatat dalam Stbl. 1918 No.612, dan Stbl. 1921 No.465 serta Stbl. 1930 No. 352.

Pegagan Ulu suku Satu, Kemen, Danau, Kuro (Pampangan), Pegagan Ulu suku Dua, Pangkalanlampan, Kayu Agung, Tulung Selapan, Teloko, Rambutan, Sirah Pulau Padang, Bengkulu, dan Mesuji.

- d. *Onder Afdeeling* Banyuasin dan *Kubustreken* (di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Talang Betutu), terdiri dari beberapa *Marga*, yaitu: Sungai Rengas, Kumbang, Upang, Sungai Aren, Sungsang, Penuguan (Dusun Berdikari), Muara Telang, Rantau Bayur, Gasing, Dawas, Tangjung Lago, Supat, Talang Kelapa, Kubu Lalan, Pangkalan Balai, Kubu Dayat, Suak Tapeh, Kubu Tungkal, Rimbo Asam, Kubu Tungkal Ilir, dan Babat.
  - e. *Onder Afdeeling* Musi Ilir (di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Sekayu), terdiri dari beberapa *Marga*, yaitu: Abab, Lawang Wetan, Penukal, Punjung, Teluk Kijing, Pinggep, Ipil, Sangadesa, Menteri Melayu, Batanghari Leko, dan Sungai Keruh.
  - f. *Onder Afdeeling* Rawas (di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Surulangun), terdiri dari beberapa *Marga*, yaitu: Hulu Rawas, Sukapindah Hilir, Sukapindah Hulu, Rupit Hilir, Muara Rupit, Rupit Tengah, Sukapindah Tengah, dan Rupit Dalam.
2. *Afdeeling* Palembang Ulu atau *Palembangsche Bovenlanden*, (di bawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Lahat, membawahi beberapa *Onder Afdeeling*, yaitu:
- a. *Onder Afdeeling* Lematang Hulu (di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Lahat), terdiri dari beberapa *Marga*, yaitu: Tambelang Gedung Agung, Penjalang Suka Empayang Ilir, Puntang (Tambelang), Penjalang Sukapangi, Empat Suku Negeri Agung, Lawang Kulon, Manggul, Penjalang Sukalingsing, Gumay Lembak, Sikap Dalam Sukalingsing, Gumay Talang Ilir, Penjalang Suka Empayang Kikim, dan Tujuh Pucukan Suku Bunga Mas Saling Ulu.
  - b. *Onder Afdeeling* Lematang Ilir (di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Muara Enim), terdiri dari beberapa *Marga*, yaitu: Sungai Rotan, Tambelang Ujan Mas, Ampat Petulai Curup (Curup), Tambelang Patang Puluh Buhung, Ampat Petulai Dangku (Dangku), Tambelang Karangraja (Karangraja), Ampat Petulai Kuripan (Kuripan), Lawang Kidul (Darmo),



Ampat Petulai Dalam Blimbing(Belimbing), Penangulung Puluh (Tanjung Agung), Lengi (Gunung Megang), Penang Tengah Selawi (Pandan Dulang), Benakat, Penangsang Puluh (Sugiwaras), Tambelang Penanggiran, dan Semendo Darat (Pulau Panggung).

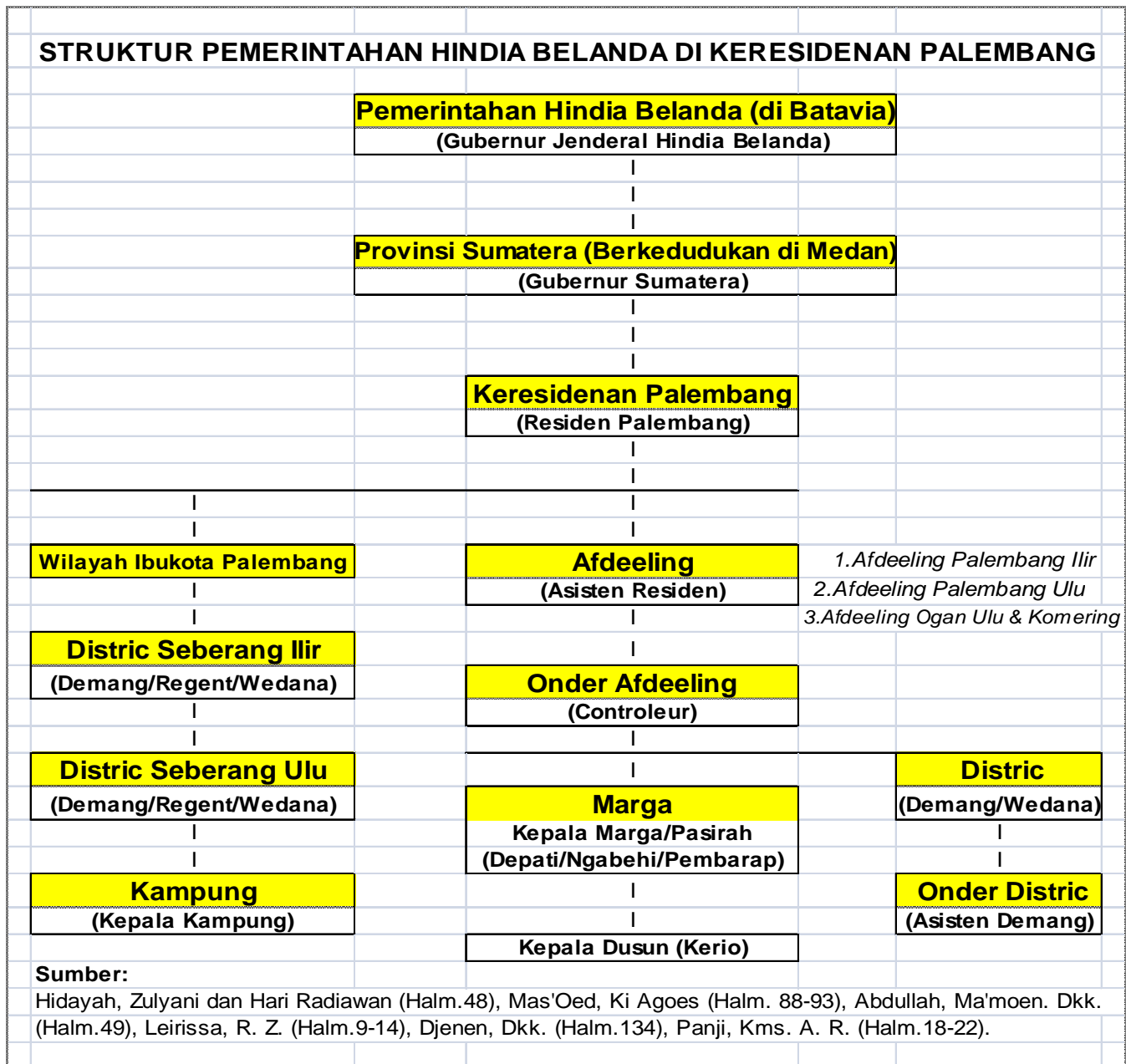
- c. *Onder Afdeeling* Tanah Pasemah (di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Pagar Alam), terdiri dari beberapa *Marga*, yaitu: Sumbai Besar Suku Kebonjati, Sumbai Ulu Lurah Suku Pajarbulan, Sumbai Penjalang Suku Tanjung Kurung, Sumbai Mangku Anom Suku Penantian, Sumbai Besar Suku Lubuk Buntak, Sumbai Tanjungraya Suku Muaraempayang, Semidang Suku Palangkenidai, Semidang, Sumbai Mangku Anom Suku Muara Seban, Gumay Hulu, Sumbai Tanjungraya Suku Gelungsakti, Mulak Hulu, Sumbai Besar Suku Alundua, dan Pagar Gunung.
  - d. *Onder Afdeeling* Tebing Tinggi (di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Tebing Tinggi), terdiri dari beberapa *Marga*, yaitu: Wulung Dusun, Lintang Kiri Suku Sadan, Sikap Pelabuhan, Kejahatan Mandi Lintang, Kejahatan Mandi Musi Ilir, Tiang Pumpung Suku Ulu, Kejahatan Mandi Musi Ulu, Lintang Kanan Suku Muara Danau, Tedajin, Lintang Kiri Suku Muara Pinang, Sikap Dalam Musi Ulu, Lintang Kanan Suku Babatan, dan Pasemah Air Keruh.
  - e. *Onder Afdeeling* Musi Ulu (di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Muara Beliti), terdiri dari beberapa *Marga*, yaitu: Sikap dalam Musi, Proatin Lima, Bulan Tengah Semangus, Tiang Pumpung Kepungut, Bulan Tengah Suku Tengah, Batu Kuning Lakitan, Bulan Tengah Suku Hulu, Suku Tengah, Lakitan Hulu, Proatin Sebelas, dan Sindang Klingi Hilir.
3. *Afdeeling* Ogan dan Komerling Ulu (di bawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Baturaja, membawahi beberapa *Onder Afdeeling*, yaitu:
- a. *Onder Afdeeling* Ogan Ulu (di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Baturaja), terdiri dari beberapa *Marga*, yaitu: Temenggungan, Lubuk Batang, Samakrian, Proatin Empat Suku Satu, Aji, Ngabehi Empat, Semidang Alundua Sukutiga, Lubai Suku Dua, Bindu Langit Lawang Kulon, Rambang Kapak Tengah, dan Sosoh Buay Rayap.
  - b. *Onder Afdeeling* Muaradua (di bawah seorang Kontroler yang berkedudukan di

Muaradua), terdiri dari beberapa *Marga*, yaitu: Ranau, Kisam Tengah Suku Satu, Mekakau Hulu, Kisam Hulu, Mekakau Hilir, Kisam Tengah Suku Dua, Gunung Tiga, Kisam Hilir, Blambangan (Buairunjung), Bayur, Aji, dan Kiwis (Buaisandang).

- c. *Onder Afdeeling* Komerling Ulu (dibawah seorang Kontroler yang berkedudukan di Martapura), terdiri dari beberapa *Marga*, yaitu: Semendawai Suku Satu, Paku Sekunyit, Semendawai Suku Dua, Bunga Mayang, Semendawai Suku Tiga, Buay Pemaca, Madang Suku Satu, Leng kayap, Madang Suku Dua, Kitti, Buai Pemuka Bangsa Raja, dan Belintang.

*Onder Afdeeling* yang merupakan distrik dan membawahi *onder distrik* dibantu oleh beberapa personil Mantri Polisi dan Mantri Pajak (*belasting*), adalah aparat pemerintahan formal yang diangkat dan digaji oleh pemerintah Hindia Belanda, yang secara vertikal melaksanakan perintah atasan, sehingga arus pemerintahan hanya satu arah yaitu dari atas ke bawah. Segala sesuatu berasal dan diatur dari pusat dan diselenggarakan oleh aparat pemerintahan pusat dan daerah (sentralisasi).

Pejabat-pejabat seperti Residen, Asisten Residen, dan Kontroler pada umumnya dipegang oleh orang-orang Belanda yang merupakan suatu Koprers tersendiri yang lazim disebut “Nederlandsche Cop van het Binnenland Bestuur” Orang-orang pribumi hanyalah menjabat sebagai pegawai biasa (*ambtenaar*) seperti Demang, Asisten Demang, Mantri Polisi, dan Mantri Pajak. Residen sebagai penguasa Administratif, legislatif, Yudikatif, dan Fiskal adalah kepala pelaksana teknis di tingkat Keresidenan, sedangkan Asisten Residen yang mengepalai *Afdeeling* sejajar dengan seorang Kontroler pada dasarnya hanya mengumpulkan data informasi dan melaksanakan semua perintah dari atasannya. Dalam melaksanakan tugas kewajiban pemerintahan, Kontroler didampingi oleh seorang Demang, Asisten Demang dan beberapa orang Mantri adalah orang-orang pribumi. Dengan kata lain bahwa pemerintah Belanda dalam berhubungan dengan rakyat, selalu memperalatkan pejabat-pejabat pribumi dan menunjukkan sikap kehati-hatianya (menghindari) kontak langsung dengan rakyat.



Di daerah Uluan sistem pemerintahan Marga yang merupakan sistem pemerintahan formal tradisional masih tetap berlangsung bahkan diberi hak untuk hidup berdasarkan *Gemeente Ordonantie* Stbl. 1919 No. 814. Sejak saat itu status Marga merupakan daerah otonom yang mengatur masyarakat agraris tradisional dalam ruang lingkungannya. Dalam *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) tahun 1938 No. 490.34 dinyatakan bahwa masing-masing Marga yang membawahi beberapa dusun dikepalai oleh seorang *Pesirah* dengan gelar *Depati* atau

*Ngabehi*. Setiap dusun dikepalai oleh seorang *Kerio*, sedangkan dusun di ibukota Marga dikepalai oleh *Pembarap*. Semua pejabat formal ini dipilih oleh penduduk yang mempunyai hak memilih untuk waktu yang tidak ditentukan. Para *Pesirah* (*Depati/Ngabehi*) yang telah menjalankan tugasnya selama 15 tahun biasanya dihentikan dengan hormat oleh Residen dengan diberi gelar “Pangeran” (Abdullah, 1984: 50-51).

Dengan adanya Pejabat Kontroler sampai di tingkat pemerintahan yang paling bawah (dalam hal ini Marga dan Kampung), maka jelaslah bahwa tangan pemerintah (birokrasi) bisa menjangkau ke masyarakat dan tersentralisasi. Namun, pemerintahan kolonial ini tetap dijalankan secara dualistis, yaitu adanya Hukum Adat dan Hukum Negara.

Ketika Pemerintahan kolonial Belanda mengambil alih kekuasaan pasca Kesultanan Palembang Darussalam mereka mengadopsi dan menerapkan sistem administrasi pemerintahan keresidenan yang dipopulerkan oleh pemerintahan Inggris. Ketika Inggris menguasai Nusantara, Thomas Stamford Raffles menerapkan sistem keresidan di Pulau Jawa di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal di India. Setelah Indonesia dikembalikan pada Belanda sistem itu tetap dipertahankan oleh Pemerintah Hindia-Belanda.

Menurut Konstitusi tahun 1814/1815, Raja Belanda mempunyai hak kekuasaan penuh untuk mengatur tanah jajahan termasuk Hindia-Belanda, sedangkan *Staten General* (DPR Belanda) tidak mempunyai hak kontrol. Pemerintahan tertinggi di tanah jajahan adalah Gubernur Jenderal sebagai wakil Raja Belanda, yang dibantu oleh empat orang penasehat, seorang sekretaris umum, dan di bawahnya terdapat seorang sekretaris kepala. Namun, setelah kemenangan kaum liberal dalam pemerintahan Belanda dan mengeluarkan konstitusi baru tahun 1854, Pemerintahan Hindia Belanda diletakkan di bawah Menteri Jajahan dan mendapat pengawasan *Staten General* di mana anggaran belanja untuk Pemerintah Hindia-Belanda harus mendapatkan persetujuan dari *Staten General*.

Dalam hubungan tersebut, Menteri Jajahan harus bertanggung jawab kepada Raja Belanda dan *Staten General*. Oleh sebab itu, ia harus memberikan bimbingan dan pengarahan yang terperinci kepada Gubernur Jenderal di Batavia dan beberapa daerah jajahan lainnya. Itulah sebabnya kebijaksanaan yang diambil oleh Gubernur

Jenderal dalam teknis pelaksanaan pemerintahan di Hindia-Belanda selalu memusatkan administrasi pemerintahan di tangannya sendiri. Gubernur Jenderal dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh para gubernur dan residen di beberapa keresidenan.

Sejak awal berdirinya Keresidenan Palembang (1825-1957) tercatat bahwa Keresidenan Palembang berjalan selama 132 tahun. Residen Palembang secara bergantian atau periodik menjadi Kepala Pemerintahan. Hal ini terjadi karena ketidaksiapan Indonesia dalam menyiapkan secara penuh mengenai ketatanegaraan Republik Indonesia. Meskipun telah menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan pengakuan kedaulatan Belanda pada Konferensi Meja Bundar (1949), tetapi Keresiden Palembang belum dihapuskan. Idealnya, dengan kemerdekaan Republik Indonesia itu telah terjadi peralihan pemerintahan dari Keresidenan Palembang ke Pemerintahan Republik yang independen secara langsung pada saat itu juga. Namun, ketidaksiapan Pemerintahan Republik Indonesia pada masa itu, maka peralihan pemerintahan daerah -dalam hal ini keresidenan- dilakukan secara bertahap, sampai terbentuknya pemerintahan yang definitif dan dilanjutkan dengan sistem Pemerintahan Provinsi (Provinsi Sumatera Selatan).

Sebagai data awal dan untuk bahan kajian dan penelitian selanjutnya, disini dituliskan beberapa nama-nama residen yang pernah bertugas sebagai Residen Palembang. Mereka adalah: J.L. van Sevenhoven (1825) sebagai Residen pertama, de Kock (?), Steimetz (1849), Tideman (1928), H. A. Najamuddin (?), Abdul Razak (?), Mgs. H. Abdurrachman (?), dan H. M. Hoesein. Residen terakhir dihapuskan pada tahun 1957 yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang baru. Setelah dihapuskannya sistem Keresidenan Palembang, maka jabatan ini digantikan oleh gubernur sebagai pejabat Provinsi di Sumatera Selatan. Berikut ini nama-nama Gubernur Sumatera Selatan dari masa ke masa, yaitu: Dr. A.K. Gani, Dr. M. Isa, Winarno, H. M. Hoesien, Muchtar Prabu Mangkunegara, H. Achmad Bastari, H. A. Abuyasid Bustomi, H. Ali Amin, SH., H. Asnawi Mangku Alam, H. Sainan Sagiman, H. Ramli Hasan Basri, H. Rosihan Arsyad, Ir. H. Syahrial Oesman, M.M., Dr. H. Mahyuddin NS., Sp.OG., dan Ir. H. Alex Noerdin (2008 s.d sekarang).

Untuk wilayah ibukota Keresidenan Palembang sejak tahun 1919 sampai dengan sekarang dalam Pemerintahan Palembang (*Haminte* Palembang) tercatat

sudah ada 21 orang Walikota Palembang. Berikut ini adalah Nama-nama Walikota Palembang dari masa ke masa:

1. Ir. RCAFJ Nesse van Lissa (1919-1925)
2. J. Le Coeg de Armand dar Ville (1925-1932)
3. FH van Wetering (1932-1939)
4. PHM. Hilde Brand (1939-1942)
5. Ir. Ibrahim Zahier (1942-1945)
6. Raden Hanan (1945-1947)
7. Y. De Bont (1947-1948)
8. W. Van Doop (1948-1950)
9. Bay Salim (1950)
10. Mr. R. Sudarman Gandasubrata (1950-1954)
11. R. A. Abusamah (1954-1955)
12. R. M. Ali Amin, SH. (1955-1960)
13. Mgs. Abdur Rachman (1960-1962)
14. Abdullah Kadir (1962-1968)
15. Rasyad Nawawi (1968-1970)
16. R.H.A. Arivai Tjek Yan (1970-1978)
17. Drs. H. Dahlan HY (1978-1983)
18. H. Cholil Aziz, SH. (1983-1993)
19. Drs. H. Husni (1993-2003)
20. Ir. H. Eddy Santana Putra, MT. (2003-2013)
21. H. Romi Hertton, SH., MH. (2013-sekarang)

### **Penutup**

Sejarah Perjalanan Keresidenan Palembang ini termasuk dalam ranah Sejarah Pemerintahan, dan sangatlah penting untuk diungkap karena penulis merasakan sendiri terjadinya kesalahan penapsiran yang sangat fatal pada generasi muda saat ini. Jika mengacu dari namanya “Keresidenan Palembang” adalah cikal bakal pemerintahan kota Palembang, padahal fakta yang sebenarnya menyatakan bahwa “Keresidenan Palembang” adalah cikal bakal terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintahan Palembang adalah salah satu wilayah bagian dari Keresidenan

Palembang yang merupakan ibukota dari Keresidenan Palembang (Provinsi Sumatera Selatan) sejak dulu hingga saat ini.

Sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang Darusalam tahun 1825, sistem pemerintahan diganti dengan Keresidenan Palembang hingga secara resmi dihapuskan pada tahun 1957. Keresidenan Palembang pada masa awal adalah bagian dari Provinsi Sumatera (1 Provinsi), kemudian Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi 3 Provinsi yaitu sebagai berikut: Provinsi Sumatera Utara (terdiri dari Keresidenan Aceh, Sumatera Timur [Medan], dan Tapanuli), Provinsi Sumatera Tengah (Keresidenan Sumatera Barat [Bukit Tinggi], Riau, dan Jambi), Provinsi Sumatera Selatan (Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Bangka-Belitung).

Pasca pemekaran Provinsi Sumatera menjadi tiga provinsi, Provinsi Sumatera Selatan terjadi beberapa kali pemekaran wilayah dan peningkatan status menjadi 4 provinsi baru, yaitu: Provinsi Sumatera Selatan (Palembang), Provinsi Lampung (Tanjung Karang), Provinsi Bengkulu, dan terakhir Provinsi Bangka Belitung (Pangkal Pinang). Selanjutnya, jabatan Residen Palembang berganti statusnya menjadi Gubernur Sumatera Selatan.

## **REFERENSI**

- Abdullah, Ma'moen, dkk., 1984. *Kota Palembang sebagai "Kota Dagang dan Industri"*. R.Z. Leirissa, dkk. (Penyunting). Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional "Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Depdikbud.
- Djnen, dkk., 1972. *Sumatera Selatan Dipandang dari Sudut Geografi Sejarah dan Kebudayaan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Faille, P. De Roo De La, 1971. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta: Bhratara.
- Hanafiah, Djohan, 1998. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*. Palembang: Pemerintah Kota Dati II Palembang.
- Hidayah, Zulyani dan Hari Radiawan, 1993. *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan*, Sri Mintosih (Penyempurna). Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mas'oe'd, Ki Agoes, 1941. *Sedjarah Palembang Moelai sedari Seriwidjaya sampai kedatangan balatentara Dai Nippon*. Palembang: Maroeyama
- Panji, Kemas A.Rachman, 2002. *Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*. Palembang: Forum Pengkajian Sejarah Sosial dan Budaya (FPS2B dengan Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Palembang (PSMTI)
- van Sevenhoven, J.L., 1971. *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, terjemahan Sugarda Purbakawatja. Jakarta: Bhratara.